**Madrasah Diniyah:
Antara Realitas, Political Will, dan Political Action**

Yusuf Hanafiah
Universitas Ahmad Dahlan
yusuf.hanafiah@pai.uad.ac.id

Abstrak:: Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi riil Madrasah Dininyah di kota Yogyakarta beserta dinamikanya; political will dan political action pemerintah c.q Kemenag Kota Yogyakarta mengatur keberadaan dan pelaksanaan pendidikan keagamaan oleh Madin; serta apa saja tantangan yang dihadapi Kemenag kota Yogyakarta dalam membina Madin. Jenis metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik. Hasil dari penelitian menunjukkan 1) Madin-Madin tdi kota Yogyakarta dapat beroperasi menjalankan kegiatan pembelajaran dengan beberapa problematika yang dihadapi, di antaranya kelemahan dalam tata lembaga dan tatakelola; kurikulum yang stagnan; minimnya SDM secara kualitas dan kuantitas; minimnya sarana dan prasarana; trend penurunan animo peserta didik; serta minimnya pendanaan; 2) Kementerian Agama Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pembinaan yang bersifat regulatif-normatif dalam terhadap Madin; dan 3) Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memajukan Madin secara umum adalah perlunya political will (kemauan/keberpihakan politik) dan political action (tindakan politik) dengan melakukan beberapa hal di antaranya menerbitkan kebijakan makro yang lebih berpihak terhadap Madin; meningkatkan kerjasama lintas instansi birokrasi; merumuskan kebijakan anggaran yang lebih pro-Madin; dan peningkatan substansi layanan dan pembinaan.

Kata Kunci: Madrasah Diniyah, Realitas, Political Will, Political Action

Pendahuluan

Perkembangan zaman beserta transformasinya berjalan dengan begitu cepat tanpa terbandung. Hal itu berimplikasi pada seluruh lini kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling awal terkena dampak dari perkembangan dan transformasi zaman. Dari situlah bidang pendidikan dituntut untuk dapat merespon sekaligus beradaptasi dengan kondisi tersebut secara cepat, tepat, dan terukur. Adaptasi yang cepat dan tepat akan memberikan *impact* positif bagi dunia pendidikan secara menyeluruh. Adapun bilamana dunia pendidikan merespon secara lambat, maka wajah pendidikan akan kehilangan arah.

Dinamika sebagaimana disebutkan di atas juga terjadi dan berlaku di negeri ini. Di antara tantangan utama dunia pendidikan pada era modern ini adalah degradasi moral di kalangan anak bangsa. Para ahli telah berupaya merespon hal tersebut dengan memberikan sumbangsih pemikirannya dalam menangani degradasi moral yang terjadi akibat arus perkembangan zaman. Salah satu solusi utama dalam menjawab tantangan degradasi moral anak bangsa adalah dengan memperkuat pendidikan agama dan budi pekerti. Dunia pendidikan Islam di Indonesia dalam ulasan sejarah mempunyai sebuah institusi pendidikan tradisional yang legendaris. Institusi tersebut adalah Madrasah Diniyah, yang selanjutnya disebut Madin.

Madrasah Diniyah (Madin) merupakan sebuah institusi pendidikan agama di luar jalur sekolah umum yang menjadi alternatif bagi peserta didik yang tidak mendapatkan materi pendidikan keagamaan secara memadai di sekolah formal.⁴⁰ Peranan utama Madin sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam pasal 1 ayat 1 adalah melengkapi, mengembangkan, dan memperkaya pendidikan keagamaan bagi peserta didik secara terstruktur di luar jalur pendidikan formal.

Berangkat dari sini, Madin kerap disebut juga sebagai Madrasah Diniyah Takmiliyah (pelengkap). Sehingga secara hukum, Madin merupakan jenis pendidikan nonformal. Faktanya, secara *positioning* Madin dengan sistem pendidikan nasional terbilang sangat strategis. Madin merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan di negeri ini. Madin secara historis telah mampu memerankan dirinya dalam kancah pendidikan tanah air, khususnya dalam hal penguatan pendidikan keagamaan bagi masyarakat luas.⁴¹

Seiring berjalannya waktu, Madin mengalami berbagai dinamika di setiap masanya. Pada masa awal berdirinya, yakni rentang abad 19 dan 20, Madin masih berwujud sebagai sebuah institusi dengan konsep yang sederhana yang merupakan pengembangan dari pesantren. Kala itu, Madin menyelenggarakan proses pengajaran di masjid-masjid, langgar, maupun surau. Madin hanya terbatas mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam serta bahasa Arab yang menjadi kebutuhan masyarakat.⁴²

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Depag, 2003), hal. 7.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hal. 63.

⁴² Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hal. 21-22.

Pada masa orde baru, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni menteri agama, menteri pendidikan dan kebudayaan, dan menteri dalam negeri. Isi dari SKB tersebut adalah ihwal peningkatan mutu pendidikan madrasah. Dalam rangka meningkatkan mutu tersebut, dicanangkan perombakan kurikulum madrasah secara massif dengan persentasi 30% muatan agama, dan 70% muatan ilmu pengetahuan umum. Akibat kebijakan tersebut, Madin menuai gejolak karena posisinya seakan hanya menjadi pelengkap dari sekolah-sekolah formal.⁴³

Adapun pada masa kini, eksistensi Madin juga tidak dapat lepas dari dinamika serta problematika yang seakan selalu melekat, di antaranya yaitu 1) dari aspek manajerial, banyak terdapat Madin yang status kepemilikannya atas nama pribadi, yayasan, masjid, dan pesantren. Hal tersebut berpotensi menyebabkan mismanajemen internal kepengurusan; 2) kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai; dan 3) hambatan psikologis di internal kepengurusan yang membuat banyak Madin sulit menerima dan merespon perubahan yang datang dari eksternal⁴⁴. Selain ketiga fakta di atas, keberadaan Madin saat kurang diketahui oleh publik secara luas. Keberadaannya laksana pepatah Arab "*wujuudihi ka'adamih*", yaitu eksistensinya tidak banyak diketahui oleh khalayak umum. Hal tersebut tentu saja menjadi sebuah problematika tersendiri, khususnya bagi Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag selaku pembina dalam penyelenggaraan Madin.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, Madrasah Diniyah dikenal sebagai Madrasah. Madin mempunyai peran melengkapi dan menambah Pendidikan Agama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah umum pada pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madin. Tumbuh kembangnya Madin ini di latarbelakangi oleh keresahan sebahagian orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁵

⁴³ Nizah, N. *Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis*. Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, vol. 11 No.1. tahun 2016, hal. 189.

⁴⁴ M. Ishom Saha. *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia Menelusuri AkarSejarah Pendidikan Formal*. (Jakarta: Pustaka Mutiara, 2005), hal 83.

⁴⁵ Agus Basri, *Pendidikan Islami Sebagai Penggerak Pembaharuan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1984, hal. 46.

Riset multi-perspektif seputar Madin yang dilakukan oleh Ismail menyatakan, pemerintah perlu melakukan upaya peningkatan kualitas Madin secara menyeluruh agar ke depannya Madin dapat lebih fungsional dan kontributif. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengembangan SDM Madin agar mampu menyelenggarakan pendidikan agama secara lebih berkualitas.⁴⁶ Penelitian berikutnya yang berkenaan dengan Madin adalah yang dilakukan oleh Rosnita pada tahun 2019, hasilnya menunjukkan bahwa banyak dari pengajar di Madin yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang pendidik, metode pembelajaran masih menggunakan pola konvensional, kurikulum yang diterapkan tidak mengalami pengembangan, dan pemerintah maupun masyarakat menunjukkan sikap kurang peduli terhadap Madin.⁴⁷

Problematika lain yang dihadapi oleh Madin saat ini adalah persoalan eksistensi. Sebagaimana diketahui bersama, saat ini pemerintah c.q Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kebijakan lima hari sekolah yang bermuara pada sistem *full day school* di mana rata-rata kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah selesai hingga sore hari.⁴⁸ Kebijakan ini dianggap dapat mengancam eksistensi Madin sebagai suatu entitas lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia secara umum. Titik permasalahannya adalah kebanyakan Madin menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di sore hari. Di sisi lain, para siswa baru pulang di sore hari akibat penerapan *full day school*, mereka sudah kehabisan waktu dan energi untuk mengikuti pembelajaran di Madin.

Berpijak pada realitas kekinian dan literatur terdahulu, maka dapat diketahui bahwa Madin memiliki peranan penting dalam pengajaran pendidikan keagamaan yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Namun dalam perjalanan waktu, Madin kerap menemui berbagai problematika sebagaimana telah disebutkan di muka. Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan seputar peranan Kementerian Agama di Kota Yogyakarta selaku pembina Madin dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan.

Artikel ini mengupas seputar bagaimana kondisi riil Madin di kota Yogyakarta; bagaimana *political will* dan *political action* pemerintah

⁴⁶ Ismail, I. *Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif*. Kabilah: Journal of Social Community, Vol. 2 No. 2, Tahun 2018.

⁴⁷ Rosnita, R. *Evaluasi Pembelajaran Di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al Washliyah Di Kabupaten Batu Bara*. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 42 No. 2, Tahun 2019, hal. 459.

⁴⁸ Istiyani, D. (2017). *Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia*. Edukasia Islamika, 127.

c.q. Kemenag Kota Yogyakarta mengatur keberadaan dan pelaksanaan pendidikan keagamaan oleh Madin; dan apa saja tantangan yang dihadapi Kemenag kota Yogyakarta dalam membina Madin. Artikel ini menyajikan hal-hal baru yang belum dikupas oleh literatur terdahulu dari perspektif kondisi riil Madin dan kebijakan manajerial yang dijalankan oleh Kemenag dalam upaya pengembangan Madin di kota Yogyakarta.

Metode Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik. Subyek penelitian adalah Kemenag Kota Yogyakarta selaku pembina Madin, sedangkan obyek penelitian ini adalah upaya pengembangan Madin yang dilaksanakan oleh Kemenag dari perspektif manajerial, kebijakan, dan regulasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa narasumber, di antaranya kepala seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren serta beberapa pengelola Madin di kota Yogyakarta. Observasi dilakukan di beberapa Madin, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan Madin di kota Yogyakarta. Adapun tahapan teknik analisis data adalah dengan melakukan reduksi data, analisis data, dan penyimpulan.⁴⁹

Hasil dan Pembahasan

Realitas Madrasah Diniyah di Kota Yogyakarta

Di kota Yogyakarta terdapat sebanyak 31 Madin yang terdaftar secara resmi di Kantor Kemenag kota Yogyakarta. Mereka tersebar di beberapa kecamatan maupun kelurahan. Seluruh Madin sebagaimana disebutkan di atas berstatus aktif secara operasional dengan tingkat keaktifan yang variatif. Di antara ragam keaktifan Madin-Madin tersebut ada yang berjalan lancar dalam kegiatan pembelajaran dan ada pula yang berjalan dengan tertatih-tatih. Madin yang lancar dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran biasanya adalah Madin yang berada di lingkungan pesantren. Hal tersebut dikarenakan secara manajemen, SDM, kurikulum, dan sarana prasarana sudah mencukupi dan terintegrasi dengan pesantren. Adapun untuk Madin yang berjalan dengan tertatih-tatih adalah mereka yang berada di luar pesantren. Mayoritas dari mereka adalah Madin yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya.

⁴⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sebagaimana kondisi Madin di daerah lain, Madin di kota Yogyakarta juga mengalami realita dan dinamika tersendiri. Beberapa aspek yang berkenaan dengan realita dan dinamika Madin di kota Yogyakarta dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, aspek kelembagaan dan manajerial, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pasal 30 ayat (1), (2), (3). Ayat (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama, Ayat (3) pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Seluruh Madin di kota Yogyakarta berada di bawah bimbingan dan kordinasi dengan Kantor Kemenag kota Yogyakarta. Sebagaimana regulasi yang berlaku, setiap Madin harus berada di bawah instruksi dan kordinasi dari Kanwil Kemenag tempat Madin tersebut berada.⁵⁰ Hal ini senada dengan yang tertera di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Madrasah Diniyah pasal 21, yang pada prinsipnya, setiap Madin yang berdiri harus mendapatkan izin dari Kemenag kabupaten/kota setempat. Madin-Madin yang ada di kota Yogyakarta memiliki dua tipologi, yaitu 1) Madin yang berada di lingkungan pesantren; dan 2) Madin yang berada di luar lingkungan pesantren.

Fakta menunjukkan, mayoritas Madin di kota Yogyakarta merupakan Madin yang berada di luar lingkungan pesantren. Mereka kebanyakan berada di tengah-tengah masyarakat dan dikelola langsung oleh masyarakat. Kegiatan pembelajaran Madin dilaksanakan di pesantren, masjid, mushalla, rumah ustadz/kyai, maupun tempat lain yang representatif. Dalam hal kepengurusan dan penyelenggaraan, Madin-Madin tersebut seluruhnya dikelola murni oleh masyarakat. Mereka yang menjadi pengelola (pengurus) mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan langsung dari Kanwil Kemenag kota Yogyakarta. Seluruh Madin yang terdaftar di Kemenag Yogyakarta adalah Madin dengan status non-formal. Artinya, Madin-Madin tersebut tidak memiliki hubungan struktural langsung dengan Kemenag. Posisi Kemenag dalam hal ini hanyalah sebatas sebagai pembina.

⁵⁰ Abdullah Fajar, *Peradaban dan Pendidikan Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 1996, hal. 54.

Seperti halnya yang terjadi di daerah-daerah lain, pada aspek kelembagaan dan manajerial, Madin di kota Yogyakarta mengalami beberapa kendala di antaranya:

- 1) Kekuatan kelembagaan Madin yang tidak merata satu dengan yang lain. Madin yang berada di bawah naungan pesantren memiliki tata kelembagaan yang lebih baik dan terstruktur. Hal ini dikarenakan secara pengelolaan, Madin tersebut terintegrasi dengan pengelolaan pesantren yang menaunginya dengan kuantitas SDM yang relatif tercukupi. Sedangkan untuk Madin yang berada di luar pesantren, mereka belum maksimal secara tata kelembagaan. Mayoritas mereka dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan segala keterbatasan SDM.
- 2) Kemampuan manajemen pengelola Madin yang tidak merata dan cenderung kurang maksimal. Sebagaimana yang terjadi pada sisi tata kelembagaan, Madin yang berada di lingkup pesantren, mereka relatif lebih optimal dalam aspek manajemen. Sedangkan yang terjadi pada Madin di luar pesantren, mereka menerapkan sistem manajemen pengelolaan dengan seadanya. Kuantitas SDM pengelola masih menjadi faktor dominan pada kasus ini. Selain itu, kurang optimalnya aspek manajemen disebabkan oleh banyaknya pengelola Madin yang cenderung lebih fokus pada pekerjaan atau profesi utamanya. Sehingga seakan-akan pengelolaan Madin menjadi prioritas kedua, bukan prioritas utama.

Kedua, aspek kurikulum, pada dasarnya seluruh Madin di Indonesia memiliki ciri khas yang sama pada aspek kurikulumnya. Kesamaan tersebut terletak pada konten-konten atau ilmu-ilmu agama Islam yang diajarkan seperti Fiqh, Aqidah, Akhlak, Tarikh, Qur'an Hadits, dan bahasa Arab. Hal ini merupakan kurikulum *mainstream* dan telah menjadi tradisi sejak lama bagi kebanyakan Madin di tanah air. Hal tersebut dikarenakan pada awal mula berdirinya, Madin memang fokus untuk mengajarkan Ilmu agama dan bahasa Arab.⁵¹

Adapun untuk konteks Madin di kota Yogyakarta, mayoritas dari mereka juga menerapkan kurikulum sebagaimana mestinya Madin di daerah lain. Hanya saja Kemenag kota Yogyakarta memberikan kesempatan seluas mungkin kepada mereka untuk lebih mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan masing-masing. Bahkan mereka diharapkan untuk mampu mengimprovisasi kurikulum yang

⁵¹ Gunawan Ary, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal. 59.

ada. Pada aspek ini, Madin di kota Yogyakarta menganut asas fleksibilitas dan akomodatif.

Kenyataan di lapangan menunjukkan kebanyakan dari Madin di kota Yogyakarta memberikan tambahan-tambahan muatan pelajaran sesuai kebutuhan mereka. Hal ini juga tentunya menyesuaikan dengan SDM dan sarpras yang tersedia di setiap Madin. Mengingat setiap Madin memiliki perbedaan kemampuan dalam hal pemenuhan SDM dan sarpras.

Seperti umumnya Madin di daerah lain, Madin di kota Yogyakarta memiliki tiga tingkatan, yaitu Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha, dan Diniyah 'Ulya.⁵² Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Madrasah Diniyah awaliyah untuk siswa-siswa sekolah dasar (4 tahun)
- 2) Madrasah Diniyah Wustha untuk siswa-siswa sekolah lanjutan pertama (3 tahun)
- 3) Madrasah Diniyah 'Ulya untuk siswa-siswa sekolah lanjutan atas (3 tahun)

Dalam rangka menumbuh kembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernapaskan Islam, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan "memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara". Berkaitan dengan program pengajaran ada beberapa bidang studi yang diajarkan seperti.:

- 1) Al-Qur'an Hadits
- 2) Aqidah Akhlak
- 3) Fiqih
- 4) Sejarah Kebudayaan Islam
- 5) Praktek Ibadah
- 6) Bahasa Arab

Pada mata pelajaran Qur'an-Hadits santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam qur'an dan hadits. Mata pelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul dan hamba Allah, meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar.

Sedangkan mata pelajaran Fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui memahami dan menghayati syariat Islam. Sejarah Kebudayaan Islam

⁵² Ibid, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah....* hal. 23

merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam. Bahasa Arab sangat penting untuk penunjang pemahaman santri terhadap ajaran agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa dengan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam.⁵³

Sistem pengembangan kurikulum Madin dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat Kantor Wilayah/Kementerian Agama provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan Madin itu sendiri. Adapun di kota Yogyakarta, pola pengembangan kurikulum dilakukan oleh masing-masing Madin dengan mengacu pada panduan penyelenggaraan Madin dengan didampingi oleh Kemenag Yogyakarta. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah. Kementerian Agama Pusat hanya sebatas memberikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh setiap Madin dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, yakni 1) fleksibilitas kurikulum; 2) berorientasi pada tujuan; 3) efektifitas dan efisiensi; dan 4) kontinuitas.⁵⁴

Pada aspek pengembangan dan implementasi kurikulum, Madin masih belum mampu keluar dari problem makro yang bersifat klasik. Nizah dalam hasil penelitiannya menyebutkan beberapa problematika tersebut adalah 1) belum adanya dokumen tertulis kurikulum; 2) kurikulum hanya sekedar dimaknai sebagai buku ajar; 3) pendekatan kurikulum hanya sebatas pada *finishing* penyampaian materi pada buku ajar; dan 4) minimnya kompetensi SDM.⁵⁵

Problematika semacam di atas, setidaknya juga terjadi pada Madin di kota Yogyakarta. Bagi Madin yang berada di lingkungan pesantren, pengembangan dan implementasi kurikulum tidaklah menjadi masalah berarti. Kurikulum yang mereka terapkan berbasis pada kurikulum yang ada di pesantren itu sendiri. Ketersediaan SDM mereka cukup memadai secara kuantitas maupun kualitas. Mereka cukup merekrut para ustadz ataupun kyai yang berdinasti di pesantren

⁵³ Ibid. *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia...* hal. 42.

⁵⁴ Ibid, *Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah....* hal 16-18.

⁵⁵ Nizah, N. *Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis*. Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 11 No.1. Tahun 2016.

tersebut sebagai pengajar di Madin. Sedangkan untuk Madin yang dikelola oleh masyarakat, kebanyakan kurikulum mereka belum mengalami pengembangan secara signifikan. Bahkan dalam beberapa kasus beberapa di antara mereka ada yang tidak memenuhi muatan-muatan pelajaran, sebagai contoh hanya mengajarkan pelajaran Al-Qur'an dan Hadits saja, atau hanya mengajarkan beberapa pelajaran saja. Penyebabnya adalah karena keterbatasan SDM yang sanggup untuk mengajar. Tidak semua Madin melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkala. Ada kecenderungan kurikulum yang diterapkan dari dahulu hingga kini masih sama.

Ketiga, aspek sumber daya manusia (SDM), SDM merupakan komponen vital dalam suatu lembaga pendidikan. Kualitas dan kuantitas SDM akan sangat menentukan kemajuan suatu institusi pendidikan. Berbicara mengenai SDM dalam konteks Madin, secara spesifik adalah mereka para pengelola dan tenaga pendidik. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa tidak semua Madin di kota Yogyakarta memiliki SDM yang memumpuni dalam mengelola Madin secara baik dan konsisten. Khususnya bagi Madin yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat, mereka kebanyakan hanya memberdayakan SDM dari unsur masyarakat sekitar Madin berada. Ada beberapa Madin yang prinsip kerja SDMnya adalah sukarela dan swakelola. Padahal secara ideal, guru hendaknya memiliki empat kompetensi yang selalu melekat padanya, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personal. Keempat kompetensi tersebut berlaku pada setiap orang yang berprofesi sebagai guru.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya keberadaan guru di suatu aktifitas pendidikan, merupakan unsur yang vital. Sukmadinata (1997: 89) mengatakan bahwa ketiadaan kurikulum, tempat belajar representatif, dan sarana penunjang pembelajaran lainnya tidak akan menjadi polemik serius bila masih terdapat guru.⁵⁶

Artinya, keberadaan guru pada prinsipnya di atas segala program dan sarana penunjang pendidikan. Karena gurulah yang dapat mengoperasikan program dan sarana-sarana tersebut. Landasan ideal bagi seorang guru haruslah memiliki standar profesionalisme yang memumpuni. Guru sebagai seorang pendidik, secara profesional idealnya 1) menguasai bidang ilmu yang diajarkan kepada peserta didik secara komprehensif; 2) selain menguasai ilmu, guru hendaknya selalu berupaya meningkatkan kapasitas keilmuannya; 3) memiliki kemampuan *transfer of knowledge* yang baik; dan 4) memiliki standar moralitas yang tinggi. Sebagai seorang suri teladan, guru wajib

⁵⁶ Abuddin Nata, *Inovasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2016, hal. 55.

memiliki akhlak yang baik agar dapat menjadi inspirasi bagi para peserta didiknya.⁵⁷ Tuntutan profesionalisme sebagaimana disebutkan di atas, seyogyanya dapat menjadi cambuk untuk berkemajuan, meskipun tidak sedikit yang menjadikannya sebagai sebuah beban profesi.

Adapun berkenaan dengan tenaga pendidik, mayoritas Madin melakukan rekrutmen tenaga pendidik secara mandiri. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan SDM yang ada di lingkungan tempat Madin itu berada. Warga setempat yang dianggap memiliki kualifikasi atau kemampuan dalam ilmu agama, mereka akan diminta untuk mengajar di Madin tersebut. Hal ini mayoritas terjadi pada Madin yang dikelola oleh masyarakat (Madin di luar lingkungan pesantren). Bahkan tidak sedikit dari Madin yang memberdayakan tenaga pendidik dari kalangan mahasiswa.

Mahasiswa yang direkrut biasanya merupakan mereka yang berasal dari luar daerah yang tinggal di rumah-rumah kos yang ada di sekitar kampung tempat Madin tersebut berada. Semangat tinggi, waktu luang, dan kesukarelaan menjadi alasan utama perekrutan tenaga pengajar dari kalangan mahasiswa. Berbeda dengan Madin yang dikelola oleh masyarakat, untuk Madin yang dikelola oleh pesantren, tidaklah mengalami kesulitan berarti dalam hal pengajar. Kebanyakan pengajar mereka ambil dari para Ustadz maupun Kiyai yang mengajar di pesantren tersebut. Mereka secara kompetensi keilmuan agama tidak perlu diragukan lagi.

Realitas di era Globalisasi ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran signifikan terhadap peranan vital guru dalam dunia pendidikan. Di antara faktor yang menyebabkan hal itu adalah penggunaan teknologi secara massif. Turunan dari perkara ini adalah terjadinya disorientasi guru sebagai seorang pendidik sejati. Perubahan status guru sebagai sebuah pekerjaan profesional menjadikan guru itu sendiri tidak ubahnya sebagai seorang pekerja profesional yang terbelenggu oleh asas profesionalitas kerja, bahkan juga terkadang terbelenggu oleh budaya transaksional yang bersifat politis.⁵⁸

Kenyataan seperti itu saat ini seakan menjadi sebuah fenomena umum yang terjadi di berbagai spektrum pendidikan. Guru-guru yang mengabdikan dirinya di Madin sedikit banyak mulai terimbas fenomena seperti itu. Akibatnya, akan muncul berbagai problem baru yang menjadi kelanjutan problem klasik bagi guru di Madin. Termasuk dalam hal ini adalah Madin di kota Yogyakarta yang pada

⁵⁷ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, hal. 163.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 56.

kenyataannya juga tidak dapat terhindar dari problematika pada aspek SDM, khususnya tenaga guru. Di antara masalah-masalah yang sering muncul pada aspek ini adalah:

- 1) Minimnya SDM dari tenaga pengajar baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah Madin dengan berbagai mata pelajarannya belum ditopang secara memadai oleh kuantitas tenaga pendidik.
- 2) Kompetensi pengajar, secara kompetensi, sebenarnya Kemenag kota Yogyakarta menetapkan regulasi berupa standar bagi guru Madin yaitu berpendidikan S1 PAI/Studi Islam atau sekurang-kurangnya adalah lulusan pondok pesantren. Pada kenyataannya, standar tersebut belum dapat dipenuhi oleh kebanyakan Madin.
- 3) Banyaknya para pengajar Madin yang berstatus sebagai mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Manakala mereka telah menyelesaikan masa studinya, mereka akan kembali ke daerah masing-masing. Hal ini tentu saja akan beribis pada kekosongan tenaga pengajar di suatu Madin.
- 4) Mengajar di Madin bukan merupakan profesi utama bagi sebagian orang. Sudah merupakan rahasia umum bahwa banyak di antara guru Madin yang memiliki profesi lain yang lebih ditekuni sebagai wahana utama dalam mencari nafkah. Hal tersebut menyebabkan para guru tidak fokus dalam mengajar. Sehingga persepsi yang muncul adalah menjadikan Madin sebagai prioritas ke sekian.
- 5) Minimnya insentif yang diterima oleh para guru. Problem ini memiliki benang merah dengan poin sebelumnya. Minimnya insentif yang diperoleh dari mengajar di Madin menyebabkan banyak orang lebih fokus pada profesi lain. Muncul persepsi bagi sebagian orang bahwa mengajar di Madin tidak ubahnya seperti tenaga sukarelawan. Diakui atau tidak, persoalan insentif akan dapat mempengaruhi performa guru dalam mengajar.

Keempat, aspek sarana dan prasarana (sarpras), sebagai sebuah institusi pendidikan Madin seyogyanya mempunyai sarpras yang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Berbicara mengenai sarpras Madin yang ada di kota Yogyakarta dapat dikatakan secara keseluruhan belum memadai. Meskipun untuk Madin yang berada di pesantren, mereka telah mampu memenuhi kebutuhan sarpras mereka. Akan tetapi bagi Madin yang dikelola oleh masyarakat umum, kondisi sarpras secara keseluruhan belum dapat dikatakan ideal. Banyak Madin yang belum memiliki gedung milik sendiri. Mereka biasanya menggunakan masjid, mushalla, atau bahkan rumah warga untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sarana-sarana penunjang lain seperti media pembelajaran dan buku ajar juga belum dapat dikatakan memadai. Kemenag kota Yogyakarta sebenarnya telah

berupaya mendistribusikan buku-buku ajar ke berbagai Madin. Tetapi upaya tersebut belum cukup untuk meng-cover kebutuhan buku di setiap Madin karena terkendala stok yang dikirim dari Kemenag Pusat.

Kelima, animo peserta didik dan eksistensi lulusan, peserta didik pada Madin yang dinaungi oleh pesantren lebih banyak dan stabil. Hal tersebut tidak lain adalah karena mayoritas siswanya adalah para santri itu sendiri. Meskipun Madin di pesantren tetap membuka kesempatan bagi siswa dari luar pesantren. Namun berbanding terbalik bagi Madin yang non-pesantren, jumlah peserta didik dan animonya tidak terlalu signifikan. Terjadi trend penurunan jumlah peserta didik Madin secara umum di kota Yogyakarta. Status Madin yang merupakan pelengkap pendidikan keagamaan di sekolah formal menjadikan masyarakat memposisikan Madin bukan sebagai prioritas utama pendidikan. Ditambah lagi dengan diberlakukannya kebijakan *full day school* membuat para peserta didik kehabisan waktu dan tenaga untuk mengikuti pembelajaran di Madin yang biasanya diselenggarakan sore hari. Terdapat trend penurunan animo peserta didik pada setiap jenjang Madin. Untuk Selain itu, menjamurnya sekolah-sekolah Islam dengan konsep terpadu juga mempengaruhi trend penurunan animo siswa di Madin.⁵⁹

Adapun bila berbicara mengenai eksistensi lulusan, orang akan sangat jarang menyebutkan bahwa dirinya merupakan alumni Madin tertentu. Seluruh lulusan Madin yang ada di Yogyakarta secara kualifikasi tidak akan diakui bilamana tidak mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jendral. Aturan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 49 Ayat 1. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi regulatif karena label 'nonformal' yang melekat pada satuan pendidikan yang bernama Madin.

Keenam, aspek pendanaan, aspek ini merupakan hal yang tidak kalah pentingnya bagi eksistensi suatu lembaga pendidikan, termasuk Madin. Sumber utama pendanaan Madin di kota Yogyakarta adalah dari uang SPP peserta didik. Sebagian Madin juga memperoleh sumber pendanaan dari para donatur baik perorangan maupun lembaga. Sebagai contoh, ada satu lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kota Yogyakarta yang secara berkala menyalurkan dana pengembangan bagi Madin. Kemenag kota Yogyakarta juga memberikan dana bantuan kepada Madin meskipun sifatnya temporer.

Bagaimanapun juga, iuran SPP masih menjadi tumpuan utama keuangan Madin. Hal tersebut tentu saja tidak dapat mencukupi seluruh biaya operasional dan belanja pegawai Madin. Untuk beberapa

⁵⁹ Ibid, *Dinamika Madrasah Diniyah....* hal. 195.

Madin yang dikelola oleh pesantren atau yayasan besar biasanya tidak terlalu mengalami kendala keuangan. Namun bagi Madin yang berbasis di Masyarakat, masalah keuangan menjadi problem yang cukup memberatkan. Di antara imbas terbesar dari masalah anggaran ini adalah belanja pegawai (insentif pengajar dan karyawan). Banyak Madin yang memberikan insentif kepada para pengajar dengan ala kadarnya. Meskipun juga Kementerian Agama kota Yogyakarta telah berupaya memberikan insentif temporer kepada para pengajar, namun secara nominal masih terbilang kecil.

Memajukan Madrasah Diniyah: Sebuah Peranan Birokrasi

Sebagai pembina dan kordinator pelaksanaan Madin, Kemenag Yogyakarta berupaya melakukan pembinaan sekaligus usaha pengembangan Madin. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menjadi ujung tombak secara struktural dalam membina sekaligus memantau penyelenggaraan Madin yang ada di kota Yogyakarta. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Yogyakarta mengakui, bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki dokumen tertulis yang secara khusus berisikan program pembinaan Madin. Pihaknya melakukan pembinaan dengan berpijak pada buku pedoman penyelenggaraan umum Madin yang disusun oleh Kemenag pusat. Secara garis besar, upaya yang dilakukan Kementerian Agama Yogyakarta dalam membina Madin terbagi menjadi tiga aspek, yakni 1) pengembangan; 2) penguatan; 3) monitoring; dan 4) evaluasi.

Pertama, aspek kelembagaan dan manajerial, pada bagian ini Kemenag Yogyakarta mengakui bahwa Madin yang ada di kota Yogyakarta tidak semua memiliki kekuatan kelembagaan dan manajerial yang merata. Banyak Madin yang dikelola secara apa adanya berdasarkan kemampuan yang ada dan cenderung kurang maksimal. Peranan Kemenag dalam hal ini adalah dengan melakukan pendampingan Madin. Bagi Madin yang berada di jalur nonformal, upaya yang dilakukan oleh Kemenag bukan pada aspek regulasi penyelenggaraan pendidikan yang *rigid*. Tetapi upaya yang dapat dilakukan oleh Kemenag adalah dengan memompa motivasi Madin agar mampu berkembang dengan baik.⁶⁰

Manifestasi dari upaya memotivasi sebagaimana disebutkan di atas adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Madin. Upaya tersebut berwujud dukungan moril dan dukungan secara normatif kepada Madin agar terus berkembang. Pendampingan Madin secara teknis pada dasarnya dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Islam. Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Pasal

⁶⁰ Ibid, *Penyelenggaraan Pesantren...* hal. 27.

54 Ayat 2, tentang Pendidikan Keagamaan Islam dinyatakan bahwa proses pengawasan, pendampingan, dan supervisi pendidikan bagi Madin menjadi kewenangan milik Pengawas Pendidikan Islam.⁶¹

Peranan Pengawas Pendidikan Islam cukup sentral dalam pendampingan Madin, khususnya dalam aspek kelembagaan dan manajerial. Para pengawas tersebut secara formal telah memiliki landasan hukum untuk melakukan kegiatan pendampingan sebagaimana disebutkan di atas. Kemenag kota Yogyakarta mengagendakan kegiatan pendampingan kelembagaan dan manajerial Madin secara berkala. Meskipun pada praktiknya, kegiatan pendampingan atau yang juga dikenal dengan istilah turun ke bawah (turba) belum seoptimal sebagaimana telah dicanangkan. Idealnya dalam setiap semester, semua Madin mendapat pendampingan. Namun faktanya tidaklah demikian. Para pengawas mesti berbagi waktu untuk melakukan pendampingan di lembaga pendidikan formal yang lebih menjadi skala prioritas.

Di samping pelaksanaan pendampingan oleh Pengawas Pendidikan Islam, Kemenag Yogyakarta juga melakukan upaya penguatan kelembagaan dan manajerial dengan mengadakan pertemuan setiap semester sekali yang diwadahi oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Yogyakarta. Dalam forum tersebut, diharapkan para pengelola Madin dapat menjalin silaturahmi, bertukar pengalaman dan wawasan ihwal pengelolaan Madin secara optimal. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan seminar pelatihan manajemen pengelolaan Madin. Hanya saja, waktu pelaksanaan pelatihan tersebut tidak berkala, melainkan hanya temporer saja. Kendala anggaran menjadi polemik utama. Tanpa anggaran yang memadai, Kemenag tidak dapat berbuat banyak.

Kedua, aspek kurikulum, terdapat suatu paradigma umum seputar urgensi kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan. Peranan kurikulum pada suatu unit pendidikan merupakan suatu instrumen strategis yang berkorelasi pada pencapaian kulaitas satuan pendidikan.⁶² Paradigma di atas tentunya juga berlaku bagi setiap lembaga pendidikan apapun itu wujudnya. Termasuk dalam hal ini adalah Madin. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa prinsip penyusunan kurikulum Madin di kota Yogyakarta adalah berpegang pada asas fleksibilitas dan akomodatif. Artinya, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum diserahkan kepada

⁶¹ Ibid, *Pedoman Penyelenggaraan....* hal. 67.

⁶² Zainuddin, *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 213.

masing-masing Madin. Kemenag tidak memberlakukan standar baku pada aspek kurikulum. Madin kebanyakan menggunakan standar umum kurikulum yang telah ada. Kemenag Yogyakarta menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam mendorong implementasi kurikulum pada setiap Madin. Di antara ketentuan tersebut ialah:

- 1) Untuk jenjang Awaliyah, masa studi selama 4 tahun dengan jumlah jam belajar maksimal 18 jam pelajaran setiap pekannya.
- 2) Untuk jenjang Wustha, masa studi selama 2 tahun dengan jumlah jam belajar maksimal 18 jam pelajaran setiap pekannya.
- 3) Untuk jenjang Ulya, masa studi selama 2 tahun dengan jumlah jam belajar maksimal 18 jam pelajaran setiap pekannya.

Selain itu, Kemenag Yogyakarta secara sederhana membuat patokan program pelaksanaan pengajaran yang terdiri dari:

- 1) Tujuan institusional dan bidang studi
- 2) Struktur kurikulum
- 3) Sistematika penyajian
- 4) Sistem evaluasi
- 5) Tujuan pembelajaran
- 6) Pokok-pokok bahasan

Harapan dari penetapan standarisasi minimal pada aspek kurikulum adalah supaya terwujud kesamaan dan kesetaraan kurikulum antar unit Madin. Lewat forum FKDT, Kemenag melakukan sinkronisasi kurikulum Madin. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan pendistribusian buku ajar kepada Madin yang membutuhkan. Pendistribusian ini tidak dapat merata karena keterbatasan stok buku yang dikirim langsung dari Kemenag pusat. Di samping itu, secara temporer Kemenag menyelenggarakan seminar pengembangan kurikulum dan metode pengajaran bagi guru-guru Madin. Namun kenyataan di lapangan berkata lain, banyak dari Madin yang tidak menggunakan pakem yang telah ditetapkan Kemenag dengan berbagai macam alasan serta kendalanya masing-masing. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat Madin yang hanya mengajarkan beberapa mata ajar saja.

Ketiga, aspek sumber daya manusia (SDM), dalam dunia pendidikan sebagaimana telah diketahui bersama, bidang SDM merupakan aset paling vital. Keberadaannya laksana lokomotif yang menarik gerbong-gerbong yang berisikan para penuntut ilmu dan generasi masa depan. Kualitas SDM menjadi hal mutlak yang harus diperhatikan oleh seluruh stake holders yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, aspek SDM baik secara kualitas ataupun kuantitas merupakan salah satu kelemahan utama Madin. Masalah tersebut juga umum terjadi di berbagai Madin di daerah-daerah lain. Selaku

pembina, Kemenag memiliki tanggung jawab dalam kaitan pengembangan SDM Madin. Dalam aspek SDM, sebagaimana telah dipaparkan di atas, kelemahan utama terletak pada kualifikasi dan kuantitas pengajar. Berkenaan dengan peningkatan kualitas pengajar, Kemenag Yogyakarta melakukan berbagai upaya di antaranya dengan mengadakan program pelatihan guru-guru Madin.

Program di atas dilaksanakan secara temporer menyesuaikan situasi dan kondisi khususnya mata anggaran yang ada di Kemenag Yogyakarta. Program lain yang dilakukan adalah pembinaan khusus para guru melalui forum FKDT. Program ini dilaksanakan setahun sekali. Di dalam forum ini digunakan sebagai wahana pembinaan oleh Kemenag terhadap para guru dengan orientasi terwujudnya peningkatan kualitas. Metode pendampingan bagi para guru juga diterapkan kendati tidak berjalan secara rutin. Pendampingan yang dimaksud ialah pendampingan yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Islam. Bilamana dikerucutkan, maka terdapat 3 upaya yang telah dilakukan Kemenag Yogyakarta dalam upaya pengembangan SDM pengajar, yakni motivasi, pelatihan, dan pendampingan.

Dalam konteks memberikan motivasi, Kemenag dapat memfokuskan pada peningkatan motivasi kerja dengan mengacu pada teori-teori motivasi. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya motivasi kerja dalam lembaga pendidikan memiliki impact yang besar bagi optimalisasi kegiatan pendidikan itu sendiri. Raga manusia pada dasarnya selalu membutuhkan dorongan kuat untuk dapat berkarya secara maksimal. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bilamana Kemenag dalam hal pendampingan guru, memakai teori motivasi, seperti berikut ini:

1) Teori Kebutuhan Maslow

Setiap manusia mempunyai lima spesifikasi kebutuhan yang terdapat dalam diri mereka, di antaranya kebutuhan psikologis; keamanan; sosial; penghargaan; dan aktualisasi diri. Maslow meyakini, terpenuhinya kelima kebutuhan tersebut akan memberikan dorongan atau motivasi lebih bagi setiap individu untuk berbuat sesuatu. Jika salah satu di antara kelima hal tersebut tidak terpenuhi, sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja setiap orang.⁶³

2) Pendekatan Motivasi Intrinsik

Thomas mendeskripsikan orang yang termotivasi secara intrinsik ialah mereka yang memiliki kepedulian terhadap

⁶³ Saefullah. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013. hal. 263.

profesinya, berupaya keras untuk melakukan hal terbaik, dan memperoleh kekuatan dan kepuasan ketika melakukannya.⁶⁴

Kedua pendekatan motivasi kerja di atas, setidaknya dapat dipakai dalam upaya memotivasi para guru. Di samping itu juga dapat dipakai dalam menentukan pendekatan, program, serta langkah strategis Kemenag dalam memajukan Madin pada aspek SDM. Saat ini, fakta menunjukkan bahwa tidak optimalnya kinerja SDM di antaranya adalah disebabkan kurangnya motivasi diri yang notabene itu merupakan tabiat insani. Jikalau pemenuhan hak secara materiil belum dapat terealisasi, hendaknya Kemenag selalu memberikan rasionalisasi dan dorongan progresif bagi SDM Madin.

Dalam aspek SDM, terdapat kendala kuantitas yang terjadi di banyak Madin. Mereka mengalami kekurangan tenaga pengajar yang bersedia mengabdikan di tempat mereka. Dalam urusan ini, Kemenag c.q. kepala seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengakui belum mendapat solusi jitu. Kendala tersebut selama ini dikembalikan ke masing-masing unit untuk melakukan rekrutmen tenaga pengajar secara mandiri. Hal solutif yang dilakukan oleh Kemenag adalah dengan menempatkan beberapa Pengawas Pendidikan Islam untuk mengajar di Madin. Namun hal tersebut tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan pengajar di setiap Madin. Bahkan mayoritas dari unsur pengawas mendedikasikan diri mereka untuk mengajar di Madin atas nama pribadi. Akan tetapi secara kuantitas tidak memadai dan mereka cenderung menjadikan hal tersebut sebagai bentuk pengabdian. Kemenag menyadari bahwa kendala minimnya penghargaan bagi para guru Madin menjadi faktor utama setiap Madin dalam memenuhi kebutuhan pengajar.

Keempat, aspek sarana dan prasarana (sarpras), sebagai media penunjang keterlaksanaan kegiatan pendidikan, aspek sarpras mempunyai peran yang cukup penting. Terlebih lagi di era modern ini, pemenuhan aspek sarpras selayaknya menjadi prioritas setiap lembaga pendidikan. Berbicara mengenai sarpras, telah dijabarkan sebelumnya bahwa terdapat banyak Madin dengan kondisi sarpras ala kadarnya. Kemenag dalam hal ini sebenarnya telah berupaya mendistribusikan dana bantuan operasional untuk Madin dalam kaitan pemenuhan sarpras. Hanya saja secara nominal masih jauh dari kata cukup. Bahkan dalam satu tahun, Kemenag Yogyakarta hanya mampu mendistribusikan dana stimulan kepada 7 dari 31 Madin yang ada. Minimnya anggaran dari pusat memaksa Kemenag Yogyakarta untuk mendistribusikan dana tersebut secara bergantian setiap tahunnya. Bahkan menurut penuturan kepala seksi Pendidikan Diniyah dan

⁶⁴ *Ibid.*, *Manajemen Pendidikan Islam...* hal. 265

Pondok Pesantren Kemenag Yogyakarta, mata anggaran yang didistribusikan dari Kemenag pusat secara keseluruhan pada tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan. Dia tidak menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan pemangkasan mata anggaran tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut pasti akan memiliki efek domino di segala sektor kegiatan dan pendanaan Kemenag di tingkat daerah.

Belum lama ini, Kemenag pusat telah merilis aplikasi Simsarpras (sistem informasi manajemen sarana dan prasarana) bagi madrasah diniyah dan pondok pesantren. Ini merupakan aplikasi online yang dirancang untuk pendataan dan manajemen sarpras di lingkungan Madin dan pesantren. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan bagi Madin maupun pesantren dalam menginventarisir aset mereka. Di samping itu, adanya aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengajukan bantuan pengadaan sarpras secara online. Dirilisnya aplikasi tersebut sebenarnya merupakan suatu langkah positif. Namun, mengingat jumlah Madin dan pesantren di tanah air yang sangat banyak dan di saat bersamaan terjadi pemangkasan anggaran di Kemenag, hal tersebut tentu akan menjadi problem tersendiri bagi pemerintah dalam mencukupi kebutuhan sarpras setiap Madin.

Kelima, animo peserta didik dan eksistensi lulusan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenag Yogyakarta, banyak Madin yang mengeluhkan terjadinya trend penurunan peserta didik akibat kebijakan lima hari sekolah. Imbasnya hampir dari semua sekolah formal melaksanakan pembelajaran dengan sistem *full day school*. Para siswa selesai dari kegiatan pembelajaran di sore hari. Sedangkan di lain sisi, sore hari sebenarnya merupakan waktu bagi Madin untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Para siswa hampir tidak memiliki sisa waktu lagi untuk mengikuti kegiatan Madin. Mengenai kebijakan lima hari sekolah, ormas besar Nahdlatul Ulama (NU) pernah melancarkan kritik keras kepada pemerintah. Di antara poin kritikan mereka adalah kebijakan tersebut dapat mengancam eksistensi lembaga pendidikan keagamaan seperti Madin.⁶⁵

Pihak Kemenag Yogyakarta sendiri mengakui belum menemukan solusi jitu mengenai keluhan Madin dalam persoalan penurunan animo peserta didik. Pihak Kemenag Yogyakarta sudah mencoba mengkomunikasikan hal tersebut dengan instansi

⁶⁵ Eko. *NU Tolak Kebijakan Sekolah Lima Hari*. Diakses Tanggal 18 Februari 2020. Dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/nu-tolak-kebijakan-sekolah-lima-hari.html>

pemerintahan lain seperti Dinas Pendidikan kota Yogyakarta. Akan tetapi, dari komunikasi yang sudah dilakukan belum diperoleh sebuah solusi jitu dalam persoalan di atas. Komunikasi yang telah dilakukan baru pada taraf wacana dan belum sampai pada taraf tindak lanjut maupun penetapan regulasi. Kemenag Yogyakarta juga belum merancang regulasi khusus berkaitan dengan hal ini. Hal itu dikarenakan, kebijakan lima hari sekolah telah menjadi sebuah sistem yang mengakar sampai ke tingkat bawah (*grassroot*) sistem pendidikan nasional. Penanganannya membutuhkan kolaborasi antar-instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun berkenaan dengan kualifikasi lulusan Madin yang belum diakui secara formil, Kemenag pada prinsipnya mendorong kepada para lulusan untuk mengikuti ujian persamaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang terakreditasi dan ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Hingga saat ini belum terbit regulasi terbaru tentang lulusan Madin menggantikan regulasi sebelumnya.

Keenam, aspek pendanaan, hingga saat ini aspek pendanaan merupakan masalah paling pelik dan klasik bagi kebanyakan Madin di seluruh tanah air. Aspek pendanaan bagi sebuah lembaga pendidikan laksana bahan bakar yang menggerakkan mesin agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Konsekuensi logisnya, bila suatu lembaga pendidikan mengalami kendala dalam hal pendanaan, maka aktivitas pendidikan di dalamnya akan berjalan dengan tidak maksimal. Sebagaimana telah dipaparkan di muka, bahwa mayoritas Madin di Yogyakarta masih mengandalkan sumber pendanaan dari iuran bulanan (*syahriyah*) siswa yang berbentuk uang SPP. Bagi Madin yang berada satu manajemen dengan pesantren, ataupun Madin yang di bawah yayasan besar tentu tidak terlalu bermasalah dengan pendanaan. Namun bagi Madin kecil yang dikelola swadaya oleh masyarakat tentu itu cukup memberatkan. Terlebih lagi bilamana terjadi trend penurunan animo peserta didik yang pasti akan berimbas pada *income* Madin tersebut.

Sebagai suatu bagian dari sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam undang-undang, Madin sudah selayaknya mendapat perhatian ekstra dari pemerintah pusat maupun daerah. Terlebih lagi pemerintah saat ini sedang menggaungkan pendidikan karakter yang sejalan dengan visi utama Madin. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, bahwa dalam konteks pendanaan pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Lebih spesifik lagi, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 53 Ayat 1, disebutkan bahwa dalam

pendanaan Madin terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab di antaranya:

- 1) Penyelenggara;
- 2) Pemerintah;
- 3) Pemerintah Daerah;
- 4) Masyarakat; dan/atau
- 5) Sumber lain yang sah

Dalam konteks pendanaan Madin, peranan penyelenggara, orang tua, dan masyarakat tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena pada dasarnya Madin dilahirkan dari rahim masyarakat. Pada dasarnya pemerintah memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab konstitusional untuk memajukan pendidikan keagamaan khususnya Madin yang ada di tanah air. Dalam konteks pendanaan, idealnya pemerintah tidak perlu ragu untuk mengucurkan anggaran besar bagi pengembangan Madin. Namun fakta tidak sepenuhnya sejalan dengan idealita.

Banyak dari Madin di berbagai daerah, termasuk di kota Yogyakarta yang menghadapi permasalahan pendanaan. Implikasi terbesar dari minimnya pendanaan ini adalah pada aspek pengadaan sarpras dan penggajian pegawai. Sumber pendanaan yang berasal dari eksternal Madin diperoleh dari dana stimulan Kemenag dan Baznas Yogyakarta. Walaupun sebenarnya secara nominal belum bisa memenuhi kebutuhan belanja Madin secara keseluruhan.

Kemenag Yogyakarta telah melakukan upaya sesuai prosedural dengan menyalurkan dana yang berasal dari Kemenag pusat. Persoalan kembali muncul ketika ada kebijakan pemangkasan anggaran Kemenag daerah secara menyeluruh. Artinya, tidak banyak dana yang bisa disalurkan oleh Kemenag Yogyakarta kepada Madin. Kemenag harus menyalurkan dana yang terbatas tersebut secara bergilir setiap tahunnya. Upaya kerjasama antar instansi pemerintahan juga dilakukan oleh Kemenag Yogyakarta. Dalam hal ini kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Hasilnya, ada alokasi pendanaan yang dianggarkan oleh pemkot kepada Madin melalui Kemenag. Secara kuantitas tidaklah besar, dan hanya berfokus pada vakasi tenaga pengajar. Kendati demikian, pola kerjasama semacam ini patut mendapatkan apresiasi dan harus dikembangkan lebih lanjut. Sebagaimana amanat undang-undang, pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban memikirkan pendanaan pendidikan.

Pada aspek pendanaan Madin, sebenarnya ada opsi lain dengan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini bisa berasal dari suatu badan usaha ataupun perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta. Kemenag bisa saja menggandeng mereka sekaligus mengarahkan dana CSR mereka bagi pengembangan Madin. Secara

birokrasi, tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur skema semacam di atas. Namun demikian, secara normatif Kemenag merasa khawatir akan terbentuknya preseden negatif dari publik. Sebagaimana telah diketahui bersama, kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam pendanaan, sekalipun tujuannya positif akan riskan terjadi penyimpangan. Sekurang-kurangnya akan timbul persepsi kurang baik dari masyarakat. Dalam hal ini Kemenag lebih memilih untuk tidak menggunakan opsi ini.

Pemerintah dalam hal pendanaan pendidikan tentu saja tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan pihak lain. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, orang tua peserta didik dan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan. Maka, di samping bekerja sama antar instansi pemerintahan, Kemenag juga dapat melibatkan peranan masyarakat secara lebih. Upaya pendekatan secara elegan akan dapat menumbuhkan peran dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, termasuk dalam hal ini adalah Madin.

Pendekatan terhadap orang tua peserta didik menjadi hal penting karena para orang tua lah pihak yang paling utama memikirkan pendidikan anak. Orang tua menjadi pihak yang paling bertanggung jawab mencukupi kebutuhan sekolah anak. Selain itu, instrumen masyarakat juga tidak dapat dikesampingkan. Karena embrio pendidikan itu lahir dari masyarakat. Peranan strategis masyarakat di antaranya 1) pendirian; 2) pengadaan SDM; 3) pengadaan infrastruktur; 4) pengadaan dana; dan 5) sumbangan pemikiran.⁶⁶ Maka sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk merangkul unsur masyarakat dan orang tua dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, khususnya Madin.

Tantangan Madrasah Diniyah: *Political Will* dan *Political Action*

Dalam lintasan memori sejarah hingga dewasa ini, Madin telah memberikan sumbangsih terhadap pengembangan pendidikan keagamaan di tanah air. Madin sebagai sebuah bagian dari sistem pendidikan nasional telah membuktikan kiprahnya dalam upaya pembentukan watak dan kepribadian bangsa. Pergantian zaman beserta hiruk pikuknya telah membuat Madin bertransformasi guna mempertahankan eksistensi. Hingga dewasa ini, Madin masih menyisakan persoalan internal yang seakan tidak pernah bertepi. Orang tua dan masyarakat sebagai embrio lahirnya Madin, dalam ulasan sejarah telah membuktikan kiprah serta kepeduliannya.

⁶⁶ *Ibid. Reformasi Pendidikan...* hal. 110

Kementerian Agama selaku pembina Madin mengakui sendiri, bahwa di antara problematika terbesar yang dihadapi Madin adalah minimnya perhatian dari pemerintah. Inti persoalannya adalah terletak pada kurangnya keberpihakan dan tindakan riil secara politis dari pemerintah yang berupa substansi pelayanan dan pembinaan bagi Madin.⁶⁷ Oleh karenanya, pengembangan Madin secara birokratis harus dipikirkan secara serius oleh pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah memerlukan *political will* (kemauan/keberpihakan politik) dan *political action* (tindakan politik). Keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemerintah sebagai pemangku utama kebijakan dengan segala perangkatnya dapat melakukan hal-hal yang positif bagi pengembangan Madin.

Pertama, mengeluarkan kebijakan makro yang lebih berpihak terhadap Madin. Meskipun saat ini telah terdapat beberapa kebijakan pemerintah terhadap Madin, baik yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri agama, dan sebagainya, akan tetapi secara umum kesemuanya itu sebatas pada aturan penyelenggaraan yang bersifat regulatif. Belum terdapat aturan maupun perundang-undangan baru yang secara spesifik lebih berpihak pada Madin pada aspek pembinaan berkelanjutan, pengembangan semua lini, dan layanan substantif. Kalaupun sudah ada, biasanya hanya berupa kebijakan lokal yang sifatnya temporer dan belum terintegrasi secara holistik.

Dengan segala kewenangannya, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah sangat memungkinkan untuk membuat kebijakan pro-Madin. Terlebih saat ini terdapat undang-undang otonomi daerah yang memungkinkan setiap pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pengembangan pendidikan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi kedaerahan.⁶⁸ Pemerintah pusat idealnya mulai mengurangi penyelenggaraan pendidikan nasional dengan pendekatan birokratis-sentralistik yang notabene membuat instansi-instansi pendidikan yang ada di daerah, termasuk Madin kurang berkembang secara mandiri.⁶⁹ Pemerintah di tingkat pusat cukup menerbitkan kebijakan makro yang pro-Madin, kemudian untuk pelaksanaan secara teknis, daerah sangat dimungkinkan untuk mengembangkannya di tingkat lokal.

Kedua, meningkatkan kerjasama lintas instansi birokrasi. Pemerintah di semua tingkatan sangat memungkinkan untuk melakukan kolaborasi lintas instansi birokrasi. Pada dasarnya, dalam

⁶⁷ Ibid., *Pondok Pesantren...* hal. 26.

⁶⁸ Ibid., *Reformasi Pendidikan...* hal. 44

⁶⁹ Ibid., hal. 210.

mengelola pendidikan bukan hanya semata tanggung jawab tunggal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, namun lebih dari itu, ada beberapa instansi pemerintahan lain yang dapat menjadi bagian dari instrumen dalam pengembangan pendidikan nasional secara berkesinambungan. Keterlibatan beberapa instansi pemerintahan akan dapat mempermudah pengembangan pendidikan khususnya pada Madin secara efektif dan efisien. Selain itu, juga dapat meminimalisir keluarnya regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih.

Ketiga, merumuskan kebijakan anggaran yang lebih pro-Madin. Kebijakan penganggaran pendidikan merupakan urusan makro pemerintah di tingkat pusat. Urusan anggaran merupakan perkara yang sangat sentral bagi keberlangsungan penyelenggaraan negara secara umum, termasuk dalam bidang pendidikan. Sebagaimana amanat konstitusi, anggaran minimal bagi sektor pendidikan adalah 20% dari total keseluruhan anggaran belanja negara. Persentase tersebut sebenarnya tidaklah terlampau kecil. Hanya saja diperlukan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut yang saat ini belum bisa direalisasikan di semua sektor. Sebagai contoh, pada tahun 2017, persentase anggaran pendidikan antara Indonesia dan Vietnam sama-sama berada di angka 20% dari total anggaran belanja negara. Namun kenyataannya, kualitas penyelenggaraan pendidikan di Vietnam masih lebih baik dari Indonesia.⁷⁰

Pada prinsipnya, jumlah anggaran pendidikan yang besar bukanlah suatu jaminan akan kualitas pendidikan di suatu negara. Sebut saja Finlandia, negara dengan predikat pendidikan terbaik dunia saja hanya mengalokasikan di bawah 15% dari total keseluruhan anggaran belanja negara.⁷¹ Namun telah menjadi pemahaman bersama bahwasanya efektifitas penggunaan anggaran yang lebih baik dan tepat sasaran, menyebabkan Finlandia menjadi negara dengan kualitas pendidikan terbaik dunia. Secara kebijakan makro, pemerintah tidak terlalu perlu untuk meningkatkan rasio anggaran pendidikan secara ekstrem. Namun dalam konteks penganggaran pendidikan bagi Madin, pemerintah perlu meningkatkan anggaran sesuai standar kebutuhan. Selain daripada penganggaran dari sektor APBN, pemerintah sangat mungkin untuk menggandeng badan usaha baik itu milik negara ataupun swasta. Orientasinya adalah supaya CSR atau dana sosial lain yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat diarahkan ke pengembangan pendanaan Madin. Hal demikian juga memungkinkan

⁷⁰ Dinda Audriene Muthmainah. *Anggaran Sama, Pendidikan Indonesia Kalah Jauh Dari Vietnam*. Diakses 18 Februari 2020. Dari CNN Indonesia.

⁷¹ Yohanes Enggar Harususilo. *5 Negara Dengan Alokasi Anggaran Pendidikan Terbesar*. Diakses 18 Februari 2020. Dari Kompas.com.

dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah. Terutama daerah yang banyak memiliki perusahaan-perusahaan raksasa.

Keempat, peningkatan substansi layanan dan pembinaan. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa mayoritas Madin yang ada adalah berada di jalur nonformal. Artinya, seluruh pengelolaan berada di masyarakat secara penuh. Tidak ada tanggung jawab secara struktural Madin terhadap Kemenag. Demikian pula yang selama ini terjadi, bahwa pola layanan dan pembinaan yang diberikan oleh Kemenag hanya bersifat temporer dan terkesan normatif saja. Tidak mengherankan bila muncul preseden di tengah publik bahwa pemerintah kurang memperhatikan Madin. Amanat konstitusi menyebutkan secara tegas, bahwa pemerintah adalah pihak yang paling utama bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sekaligus memajukan pendidikan di tanah air. Maka tidak berlebihan apabila ada tuntutan dari masyarakat supaya pemerintah lebih memperhatikan keadaan Madin secara menyeluruh.

Kolaborasi antar instansi pemerintah, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dapat menjadi solusi peningkatan layanan dan pembinaan terhadap Madin. Terlebih saat ini dengan adanya otonomi daerah, sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk mengembangkan Madin secara serius. Sebagai permisalan, Kementerian Agama di tingkat kabupaten bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dalam rangka peningkatan kualitas guru Madin; penyelarasan jadwal kegiatan pembelajaran antara sekolah formal dengan Madin; integrasi Madin dengan sekolah formal; dan sebagainya. Peluang kolaborasi antar instansi pemerintah di tingkat daerah semacam ini merupakan sesuatu yang konstitusional dan tidak cacat hukum.

Kesimpulan

Dalam lintasan sejarah, Madin telah memberikan banyak sumbangsih bagi upaya pembentukan karakter anak bangsa serta penguatan keagamaan bagi mereka. Seiring perubahan zaman, Madin telah bertransformasi demi beradaptasi dalam mengarungi kancangnya era globalisasi. Berbagai macam dinamika serta problematika selalu ditemui di setiap zamannya.

Madin-Madin yang berada di wilayah kota Yogyakarta berjumlah 31 yang keseluruhannya dibawah bimbingan Kemenag Yogyakarta. Secara keseluruhan Madin-Madin tersebut dapat beroperasi menjalankan kegiatan pembelajaran. Terdapat banyak problematika yang dihadapi Madin, di antaranya kelemahan dalam tata lembaga dan tatakelola; kurikulum yang stagnan; minimnya SDM secara kualitas dan kuantitas; minimnya sarana dan prasarana; trend penurunan animo peserta didik; serta minimnya pendanaan.

Kementerian Agama Yogyakarta selaku pembina utama Madin-Madin yang berada di wilayah kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya yang regulatif-normatif dalam melakukan pembinaan Madin. Kemenag Yogyakarta telah menyalurkan bantuan dana operasional umum kepada Madin. Upaya peningkatan SDM dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Kerjasama antar instansi pemerintahan telah dilakukan, di antaranya ada yang telah membuahkan hasil, dan ada pula yang baru pada tataran wacana. Kendala utama yang dialami Kemenag Yogyakarta dalam pengembangan Madin adalah masalah anggaran operasional dari Kemenag pusat yang minim, bahkan terjadi pemangkasan cukup besar.

Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memajukan Madin secara umum adalah perlunya *political will* (kemauan/keberpihakan politik) dan *political action* (tindakan politik). Beberapa hal konkrit yang dapat dilakukan oleh pemerintah di antaranya menerbitkan kebijakan makro yang lebih berpihak terhadap Madin; meningkatkan kerjasama lintas instansi birokrasi; merumuskan kebijakan anggaran yang lebih pro-Madin; dan peningkatan substansi layanan dan pembinaan.

Daftar Pustaka

- Ary, Gunawan. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1986.
- Basri, Agus. *Pendidikan Islami Sebagai Penggerak Pembaharuan*. Bandung: Al-Ma'arif. 1984.
- Departemen Agama RI. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2003.
- Depertemen Agama RI. *Pedoman penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Depag. 2003.
- Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2003.
- Eko. *NU Tolak Kebijkan Sekolah Lima Hari*. Diakses Tanggal 18 Februari 2020. Dari www.merdeka.com.
- Fajar, Abdullah. *Peradaban dan Pendidikan Islami*. Jakarta: Rajawali Press. 1996.
- Harususilo, Yohanes Enggar. *5 Negara Dengan Alokasi Anggaran Pendidikan Terbesar*. Diakses 18 Februari 2020. Dari Kompas.com.
- Ismail, I. *Madrasah Diniyah Dalam Multi Perspektif*. Kabilah : Journal of Social Community, Vol. 2 No. 2, Tahun 2018.
- Istiyani, D. *Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia*. Edukasia Islamika, 127. 2017.
- Muthmainah, Dinda Audriene. *Anggaran Sama, Pendidikan Indonesia Kalah Jauh Dari Vietnam*. Diakses 18 Februari 2020. Dari CNN Indonesia.
- Nata, Abuddin. *Inovasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2016.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Nizah, N. *Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis*. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 11 No.1. Tahun 2016.
- Rosnita, R. *Evaluasi Pembelajaran Di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al Washliyah Di Kabupaten Batu Bara*. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol. 42 No. 2, Tahun 2019.
- Saefullah. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Saha, M. Ishom. *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia Menelusuri AkarSejarah Pendidikan Formal*. Jakarta: Pustaka Mutiara. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Zainuddin. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.